

RANCANGAN INDUK INDUSTRI SUSU: PELUANG & TANTANGANNYA

Susu merupakan salah satu jenis bahan pangan bergizi yang dapat berperan dalam peningkatan status gizi masyarakat. Selain itu, susu juga merupakan salah satu produk hasil ternak yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, berperan penting untuk perkembangan dunia industri pangan dan kehidupan para kelompok/koperasi/peternak sapi perah rakyat.



Oleh **Dr. Epi Taufik, S.Pt., MVPH., M.Si.**

- Kepala Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
Fakultas Peternakan,
Institut Pertanian Bogor
- Anggota Tim Analisis Penyediaan dan Kebutuhan Susu –
Kementerian Pertanian RI



Peningkatan konsumsi susu dan produk-produk olahannya dipengaruhi secara umum oleh meningkatnya kelas menengah, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengaruh susu terhadap kesehatan dan peningkatan sektor pengolahan pangan. Bank Dunia melaporkan bahwa kelas menengah Indonesia meningkat sekitar 7% per tahun, diperkirakan saat ini sudah mencapai 60% dari populasi Indonesia. Hal ini mendorong pula meningkatnya konsumsi hasil ternak, sehingga diperkirakan tingkat konsumsi susu per kapita orang Indonesia akan terus meningkat dalam jangka panjang. Data menunjukkan konsumsi susu per kapita per tahun orang Indonesia saat ini sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih yang terendah di antara negara-negara ASEAN (Tabel 1 dan 2).

Namun demikian, meningkatnya permintaan/konsumsi susu tidak diiringi oleh meningkatnya produksi susu segar dalam negeri (SSDN). Hal ini menyebabkan tingginya impor

Tabel 1. Perkembangan tingkat konsumsi susu di Indonesia

	2000	2005	2010	2016
Konsumsi (Kg/kap/tahun)	6,4	9,3	13,2	16,5
Populasi penduduk (juta)	205,1	222,8	237,6	258,7
Total Konsumsi (Tons)	1.312.640	2.072.040	3.136.320	4.268.550

Sumber : Kementan dan BPS (2017)

produk susu dari luar negeri yang tentunya bukan dalam bentuk susu segar. Gambar 1 dan 2 menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi susu nasional versus produksi SSDN yang cenderung stagnan (meningkat sedikit 3 tahun terakhir ini). Pasar konsumsi susu tumbuh sekitar 6.6%/tahun dengan persentase terbesar dalam bentuk susu bubuk (59%), disusul oleh susu cair (20%) dan susu kental manis (21%). Sementara itu, produksi SSDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya meningkat sekitar 8% (CDMI dan BPS, 2017).

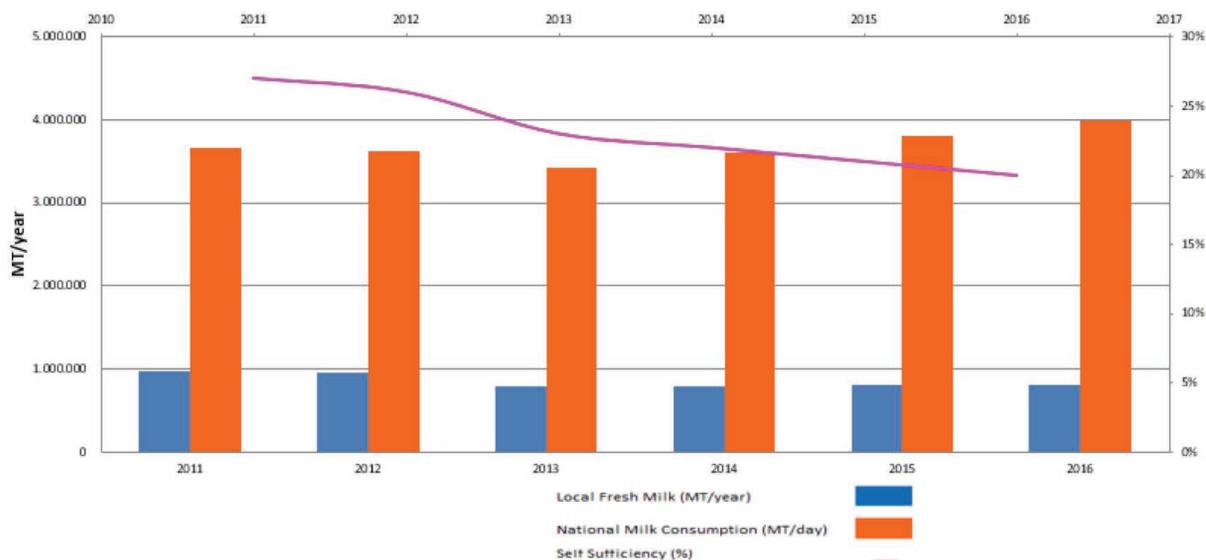
Jika kondisi ini tidak segera ditangani, kesenjangan tersebut dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan negara kita terganggu. Artinya pemenuhan asupan gizi dari susu sangat tergantung dari kondisi pasar negara eksportir. Di samping kesenjangan antara

Tabel 2. Tingkat konsumsi susu di negara-negara ASEAN (Kg per kapita/tahun)

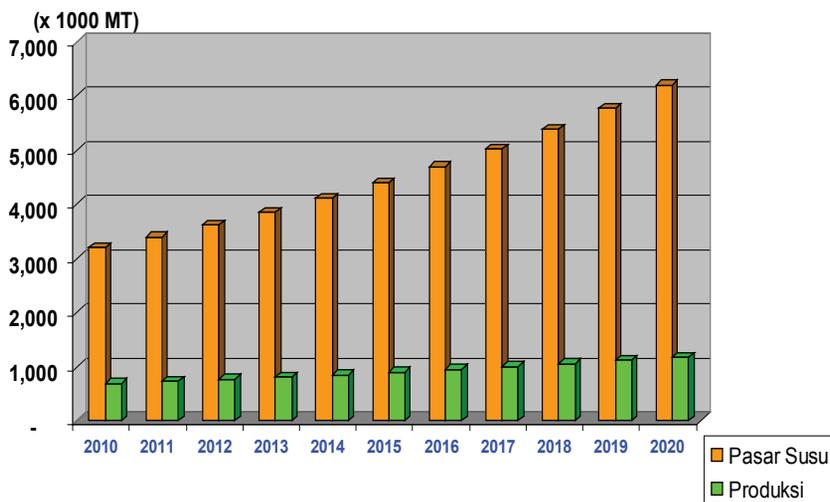
ASEAN Countries	2014	2016
Indonesia	13,2	16,5
Malaysia	36,2	50,9
Thailand	22,2	33,7
Philippines	17,8	22,1

Sumber: Kementan dan BPS (2017)

permintaan dan suplai susu, terdapat faktor eksternal dan internal yang menyebabkan impor susu semakin tinggi. Dari sisi eksternal, tuntutan IMF dalam paket reformasi termasuk penghapusan kebijakan rasio atau Bukti Serap (BUSEP) SSDN yang kemudian direalisasikan melalui Inpres No 4/1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, komitmen penurunan tarif impor (GATT/WTO, FTA regional dan bilateral) secara konsisten dan berkesinambungan



Gambar 1. Kecenderungan tingkat konsumsi susu vs produksi susu segar dalam negeri tahun 2011-2016



Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan produksi susu dan pasar susu di Indonesia

serta program *white revolution* oleh negara-negara eksportir susu dunia, telah mendorong meningkatnya impor dan penggunaan susu bubuk oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Dari sisi internal, sebagian besar (sekitar 83%) produsen Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) merupakan peternak rakyat. Walaupun mereka merupakan tulang punggung produksi susu segar nasional, namun kemampuan produksi mereka masih rendah, harganya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan harga susu bubuk impor.

Kondisi industri susu di Indonesia

Industri Persusuan (*Dairy Industry*) dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan ekonomi berupa produksi dan pengolahan susu mulai dari peternakan (*on farm/hulu*) sampai menjadi produk siap konsumsi oleh konsumen (*off farm/hilir*). Secara umum, kondisi dan permasalahan industri persusuan Indonesia saat ini dari hulu ke hilir dapat dirangkum dalam Tabel 3.

Tujuan dan sasaran rancangan induk industri susu di sektor hulu dan hilir

Orde baru pernah mengeluarkan kebijakan rasio atau Bukti Serap (BUSEP) SSDN oleh IPS yang kemudian direalisasikan melalui Inpres No 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Saat itu produksi SSDN sudah mencapai 40% dari kebutuhan nasional, sementara saat ini suplai SSDN hanya sekitar 20% (impor 80%).

Namun dengan adanya krisis moneter 1997 dan Indonesia melakukan perjanjian melalui penandatanganan LoI dengan IMF, Inpres tersebut termasuk peraturan yang ikut dicabut sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013 – 2025 yang di *-launching* pada tanggal 26 Februari 2014. Cetak biru tersebut kemudian diulas pada tahun 2016.

Ulasan dilakukan terhadap implementasi dan capaian target dari cetak biru tersebut menjadi Cetak Biru Persusuan Nasional

2017 – 2025. Cetak biru persusuan tersebut sayangnya hingga kini belum banyak diimplementasikan sehingga mengganggu pencapaian swasembada 60% kebutuhan susu tahun 2025. Beberapa rencana aksi dari cetak biru itu antara lain (1) diterbitkannya regulasi untuk mendorong serapan pasar produksi susu dalam negeri sebagai pengganti Inpres 4 Tahun 1998; (2) mendorong terbitnya regulasi *School Milk Program* untuk menjamin pasar bagi peternak rakyat yang memproduksi susu sekaligus meningkatkan konsumsi susu nasional.

Implementasi rencana aksi no (1) sebenarnya telah diupayakan oleh Kementan dengan menerbitkan Permentan No. 26/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu setelah hampir 20 tahun persusuan nasional tidak memiliki peraturan (setelah dicabutnya Inpres No 2/1985). Peraturan ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi di antara solusi-solusi lainnya untuk mengurai permasalahan persusuan nasional dengan mengakselerasi penyediaan susu dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri yang berkesinambungan. Sangat disayangkan Permentan ini hanya berusia 1 tahun, setelah diterbitkannya Permentan No. 33 tahun 2018 yang merevisi Permentan No. 26/2017 terutama dalam poin dihapusnya kewajiban kemitraan IPS dan Importir dengan koperasi/ kelompok peternak sapi perah.

Selain cetak biru persusuan nasional, Departemen (Kementrian) Perindustrian pernah mengeluarkan dokumen "Road Map Industri Susu" pada tahun 2009. Dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa Sasaran Jangka Panjang (2010-2025)

Tabel 3. Kondisi industri susu pada sektor hulu dan hilir

Hulu	Hilir
Populasi sapi perah dan sapi laktasi relatif rendah, tahun 2016: 533.933 ekor, dengan sapi perah laktasi ±267 ribu ekor.	Tingkat Konsumsi susu 2016: 16, 57 liter/kapita/tahun masih di bawah negara ASEAN.
Produktivitas sapi perah masih rendah (8-12 liter/ekor/hari), Produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) Tahun 2016 mencapai 824.127 ribu liter (BPS), baru memenuhi ± 19.7 % kebutuhan susu nasional.	Jumlah Industri Pengolahan Susu (IPS) tahun 1968-1998 = 7 perusahaan, 1998-2011 = 40 perusahaan, saat ini terdapat 60 perusahaan walaupun yang menyerap SSDN hanya 14 perusahaan.
<i>Good Dairy Farming Practices</i> belum mampu diimplementasikan secara menyeluruh khususnya oleh peternak rakyat.	Lokasi IPS mayoritas terkonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, walaupun mayoritas peternakan sapi perah ada di Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini mempengaruhi jaringan rantai pasok/logistik.
Kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota peternak yang masih kurang.	Harga susu (bubuk) internasional yang lebih murah, sementara tarif bea masuk produk susu relatif rendah (5%).
Harga bibit dan/atau sapi perah betina yang cukup mahal, sementara permodalan peternak rakyat sangat terbatas.	Koordinasi antar Kementerian/Lembaga pemerintah terkait persusuan nasional masih lemah.



industri persusuan di Indonesia adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan pertumbuhan susu olahan 10 %/tahun
- Meningkatkan populasi ternak sapi perah (Target Kementan populasi sapi perah mencapai 1.587.650 ekor pada tahun 2025)
- Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi di atas 10 sapi/peternak
- Meningkatkan produktivitas sapi perah menjadi di atas 20 liter/ekor/hari
- Meningkatkan konsumsi susu nasional menjadi 23 liter/kapita/tahun
- Meningkatkan pasokan susu segar dalam negeri (SSDN) menjadi 50 - 60%
- Meningkatkan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan skala kecil menengah
- Mengembangkan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi.
- Peningkatan kerja sama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk.
- Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah *lost generation*

Kebijakan penyerapan susu segar dalam negeri (SSDN)

Meningkatnya kecenderungan konsumsi minuman berbasis

susu segar ditandai dengan menjamurnya *cafe* atau *food vendor* yang menjual produk berbasis susu segar, harus diiringi dengan jaminan kualitas susu segar dengan diterbitkannya peraturan tentang hal ini atau revisi dan diwajibkannya standar yang telah ada, misalnya SNI tentang susu segar yang dikeluarkan oleh BSN.

Selain itu, badan yang berwenang seperti BPOM dapat mengeluarkan peraturan tentang kategorisasi pangan yang baru dengan kewajiban menuliskan komposisi susu segar yang digunakan dalam label produk olahan susu. Hal ini telah dilakukan oleh "BPOM" Thailand dan China yang mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan untuk menuliskan komposisi susu segar dan susu rekonstitusi yang digunakan pada label produk susu. Di Hongkong bahkan produk susu UHT atau pasteurisasi yang menggunakan 100% susu segar diberi label sebagai "honest milk".

Hal ini akan menciptakan "pasar baru" untuk produk olahan susu bagi konsumen, sekaligus mendorong penggunaan susu segar/SSDN oleh IPS dalam memproduksi produk-produk olahannya.

Program kampanye minum susu segar khususnya melalui program susu sekolah (*school milk*

program) harus mulai diterapkan walaupun secara gradual. Pemerintah Daerah Sukabumi pernah mencanangkan dan melaksanakan Program Gerimis Bagus (Gerakan Minum Susu bagi Anak Usia Sekolah), untuk meningkatkan konsumsi susu segar di kalangan murid SD, dengan dana dari APBD.

Pemerintah daerah lainnya, seperti Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan Semarang, Jawa Tengah juga telah merintis program ini. Tahun lalu, Pemerintah DKI Jakarta telah memasukkan produk susu ke dalam produk pangan yang mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Dapat dibayangkan jika program susu sekolah ini dicanangkan dan dilaksanakan secara nasional dengan kewajiban meminum produk susu yang 100% atau sebagian mengandung komponen susu segar, maka hal ini akan mendorong produksi dan penyerapan SSDN.

Peluang dan tantangan terkait rancangan induk industri susu

Berdasarkan uraian di atas, ada banyak peluang dan tantangan yang akan dihadapi terkait dengan rancangan induk industri susu baik pada skala hulu maupun hilir. Dari segi peluang, melihat konsumsi susu penduduk Indonesia yang masih rendah tentu memunculkan potensi yang dapat ditingkatkan, apalagi dengan didukung promosi atau program kampanye yang tepat sasaran. Potensi pengembangan ternak sapi perah di luar Jawa juga masih cukup besar sehingga dapat meningkatkan sentra baru produksi susu.

Kebijakan *reward and penalty/punishment* yang diterapkan oleh IPS dalam penerimaan susu segar akan mendidik peternak untuk bersaing dalam menghasilkan



susu dengan kualitas yang lebih baik dan bertambahnya industri peternakan dan peternakan sapi perah rakyat skala menengah, diharapkan dapat menjadi mitra kerja para peternak sapi perah dan koperasi susu. Untuk tantangan, masih perlu dibangun tata niaga persusuan yang lebih berkeadilan (*fair*) terutama untuk peternak rakyat.

Peningkatan kualitas susu segar terutama yang dihasilkan peternakan rakyat, perbaikan rantai pasok dan logistik susu melalui penerapan *cold chain logistics* dan perlunya kebijakan impor produk-produk susu (*dairy products*) yang mampu membantu memenuhi permintaan susu domestik tanpa merugikan peternak rakyat dan melanggar aturan WTO.

Referensi:

- Kementerian Pertanian. 2017. *Statistik Peternakan*. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Peternakan*. <https://www.bps.go.id/subject/24/peternakan.html#subjekViewTab1>
- Departemen Perindustrian. 2009. *Road Map Industri Persusuan*.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025)

- Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu olahan.
- Bersama *stakeholder* terkait mengusahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivitas yang tinggi dan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak.
- Bersama instansi terkait membuat sistem kredit bunga ringan untuk pengadaan bibit sapi perah unggul.
- Peningkatan cara pengelolaan ternak dari ukuran kecil menjadi ukuran sedang sehingga bisa menurunkan biaya *fix cost* ditingkat peternak
- Meningkatkan SDM dan penyediaan pakan dan bibit unggul sehingga bisa menaikkan produktivitas peternak sapi perah.
- Memperdalam *research & development* untuk inovasi produk pengolahan susu yang berkualitas dan bermanfaat serta terintegrasi.